

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN.**

Pengadilan Militer merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang secara struktur Organisasi berada di bawah Mahkamah Agung RI yang berfungsi menegakkan hukum yang independen, efektif, efisien dan berkeadilan khususnya dilingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya. Setelah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (One roof system) sesuai UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, maka secara yuridis terdapat adanya perubahan dibidang organisasi, administrasi dan keuangan yang semula berdasarkan keputusan Pangab Nomor : Kep.01/P/I/1984 tanggal 27 Januari 1984 berada dilingkungan Mabes TNI, maka beralih ke Mahkamah Agung RI sesuai dengan ketentuan pasal 45 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke Mahkamah Agung Republik Indonesia maka pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di Mahkamah Agung. Dalam hal Binpers Militer dilingkungan Peradilan Militer sampai saat ini masih berada di bawah Mabes TNI sebagaimana ditentukan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Terhadap pegawai Negeri Sipil yang berada pada lingkungan Peradilan Militer sesuai dengan ketentuan pasal 45 b secara otomatis beralih menjadi PNS Mahkamah Agung. Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Surat Keputusan Bersama Nomor : KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/5/VIII/2004. Saat ini organisasi Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Peradilan Militer dalam system ketatanegaraan berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata

untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah :

- a. Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Kota Magelang.
- c. Kabupaten Magelang.
- d. Kabupaten Klaten
- e. Kabupaten Wonogiri
- f. Kabupaten Banjarnegara
- g. Kabupaten Purbalingga
- h. Kabupaten Banyumas
- i. Kabupaten Cilacap
- j. Kabupaten Kebumen
- k. Kabupaten Wonosobo
- l. Kabupaten Temanggung
- m. Kabupaten Purworejo

Pengadilan Militer sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Militer menyelenggarakan fungsi utama sebagai berikut :

1. Memeriksa dan memutus dalam peradilan tingkat pertama perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran lalu lintas yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi wewenangnya yaitu prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
2. Mengatur dan meneruskan permohonan banding, Kasasi. dan Grasi serta Peninjauan kembali perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

## **B. VISI DAN MISI**

Didalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sebagai puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi yang dimaksud

adalah Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 yang Agung (*Court of Excellence*). Oleh karena itu di dalam upaya mencapai visinya tersebut melalui misi yang telah ditetapkan yang meliputi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan, profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

### **C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Dalam rangka menunjang terealisasinya visi dan misi tersebut diatas, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menentukan rencana strategis sebagai berikut:

#### **1. Tujuan**

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 menyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian hukum, Asas keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakkan hokum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi dan perbaikan kinerja aparatur pemerintah/Negara.

Sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam periode 2015-2019 adalah suatu program peningkatan kinerja yang ada atau sudah berjalan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan uraian sebagai berikut :

- a. Tercapainya azas peradilan yang murah, mudah dan cepat
- b. Terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
- c. Terciptanya pemenuhan, perlindungan dan penegakkan hukum yang tegas dengan skala prioritas kejahatan yang menjadi perhatian masyarakat.

- d. Terciptanya budaya hukum dan profesionalisme di kalangan aparat hukum dalam rangka penegakan, pelayanan, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hukum.
- e. Tersedianya / terpenuhi infrastruktur dan supra struktur guna penunjang pelaksanaan tugas operasional terhadap sistem pelayanan publik yang adil, transparan, akuntabel serta kapabel dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang berpihak pada rakyat.

## **2. Sasaran**

Hasil (result) yang diharapkan dan ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam hal ini Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam waktu yang telah ditentukan (Renstra tahun 2015-2019) adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan aksebilitas putusan hakim.
- c. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi (TI).
- d. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
- e. Peningkatan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).
- f. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- g. Peningkatan pengelolaan asset, keuangan dan kinerja.

## **3. Kebijakan dan Program**

Untuk meningkatkan akselerasi pencapaian kinerja merujuk pada visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, telah ditetapkan tujuan Renstra tahun 2015-2019 yaitu :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatkan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
- e. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan.
- f. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan.

g. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Penetapan tujuan dari renstra di atas, akan diimplementasikan dalam DIPA melalui program:

- a. Program peningkatan manajemen dan kepemimpinan Peradilan Militer.
- b. Program peningkatan area sumber daya manusia.
- c. Program peningkatan kebijakan peradilan dan proses pengadilan.
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana.

**BAB II**  
**KEADAAN PERKARA DI PERADILAN MILITER**

**A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA**

**1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama**

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku pengadilan Tingkat Pertama dalam Tahun 2019 telah menerima sebanyak 67 (enam puluh tujuh) perkara yang terdiri dari 60 (enam puluh) perkara kejahatan dan 7 (tujuh) perkara pelanggaran lalu lintas. Dari 67 (enam puluh tujuh) Perkara tersebut terdiri dari beberapa klasifikasi Perkara sebagai berikut :

No.	Klasifikasi Perkara	Sisa Awal	Masuk	Putus	Di kembalikan	Ket
a	b	c	d	e	f	g
	Sisa Awal = 0					
1	Desersi	0	14	14	0	
2	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain luka	0	2	2	0	
3	Karena Kealpaannya menyebabkan orang lain mati	0	1	1	0	
4	Kekerasan dalam Rumah tangga	0	3	3	0	
5	memaksa orang dengan kekerasan	0	1	1	0	
6	Narkotika Gol. I	0	4	4	0	
7	Pelanggaran Lalin	0	7	7	0	
8	Pelanggaran susila	0	3	3	0	
9	Pemalsuan Surat	0	1	1	0	
10	Pencurian	0	2	2	0	
11	Penganiayaan	0	3	3	0	
12	Penggelapan	0	1	1	0	
13	Penipuan	0	4	4	0	
14	Perkawinan Ganda/Poligami	0	1	1	0	
15	Perkosaan	0	1	1	0	
16	Perzinahan	0	5	3	2	
17	Tidak Hadir Tanpa Ijin	0	6	6	0	
18	Tidak menaati perintah dinas	0	3	3	0	

a	b	c	d	e	f	g
19	lain-lain	0	5	5	0	
Jumlah		0	67	65	2	

## 2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Bahwa selama tahun 2019 yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 9 (Sembilan) perkara dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Rianta, Serma NRP 31940228970274, Kesatuan Babinsa Koramil 05/Kali Bawang, Kodim 0731/Kulonprogo
- 2) Budi Hastomo, Kopka NRP 31960784260477, Kesatuan Pomdam IV/Diponegoro
- 3) Achmad Chaeroji, Serda NRP 31020107290781, Kesatuan Ba Slog Kodam III/Siliwangi
- 4) Tri Laksana, Serka NRP 21070411190285, Kesatuan Yonif 405/SK
- 5) Diyar Endra Brahmanti, Praka NRP 31060202111185, Kesatuan Kodam IV/Diponegoro
- 6) Sri Wiyoko, Serma NRP 31940236060974, Kesatuan Ba Hakja Minvet IV-12/Wonosobo, Babiminvetcaddam IV/Diponegoro
- 7) Afan Agus Prayogo, Prada NRP 31170571520298, Kesatuan Ta Rindam IV/Diponegoro
- 8) Ismail, Sertu NRP 523289, Kesatuan Ba Musik Satsik Lanud Adisutjipto
- 9) Abdul Mujib Amd. Kep, Kapten Ckm/21960272271275, Karumkitban 04.08.01 Kesdam IV/Dip.

## 3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Bahwa selama tahun 2019 yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 11 (Sebelas) perkara dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Sudarman, Serda NRP 31020585950781 Kesatuan Ba Kodim 0702/Purbalingga

- 2) Irgamal Saleh, Kopda NRP 31030337790281 Kesatuan Ta Yonif Raider 408/SBH Yonif Raider 408/SBH.
- 3) Heri Purwanto, Serda NRP 31010575231280 Kesatuan Ba Yonif 403/WP
- 4) Achmad Chaeroji, Serda NRP 31020107290781 Kesatuan Baslog Dam III/Slw Kodam III/Slw
- 5) Diyar Endra Brahmanti, Praka NRP 31060202111185 Kesatuan Ta Kodam IV/Dip
- 6) Budi Hastomo, Kopka NRP 31960784260477 Kesatuan Pomdan IV/Diponegoro.
- 7) Sri Wiyoko, Serma 31940236060974, Kesatuan Babiminvetcaddam IV/Dip
- 8) Afan Agus Prayoga, Prada 31170571520298, Ta Rindam IV/Dip,
- 9) Tri Laksana, Serka NRP 21070411190285 Kesatuan Yonif 405/SK
- 10) Ismail, Sertu NRP 523289, Kesatuan Ba Musik Satsik Lanud Adisutjipto
- 11) Syamsudin, Praka NRP 31071164630385 Tayanrad 2 Rukurmed Rai C Yon Armed 3/105/Tarik

#### **4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali**

Bahwa untuk upaya hukum Peninjauan Kembali selama tahun 2019 tidak ada/nihil.

#### **B. PENYELESAIAN PERKARA**

Bahwa perkara yang masuk pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama kurun waktu tahun 2019 sejumlah 67 Perkara (60 Kejahatan, 7 Pelanggaran) dari total perkara tersebut telah selesai diputus semua.



## 1. Jumlah Sisa perkara yang diputus

Bahwa pada akhir tahun 2019 = 0, jadi di awal Tahun 2020 pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak terdapat sisa perkara/Nihil.

## 2. Jumlah Perkara Putus tepat Waktu

Dari sejumlah 67 Perkara yang telah diselesaikan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta semuanya diselesaikan tepat waktu sesuai dengan tabel monitoring putusan Perkara sebagai berikut :

NO	BULAN	< 3 BULAN	4 - 5 BULAN	6 - 12 BULAN	> 12 BULAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	JANUARI	4	0	0	0	
2	FEBRUARI	3	0	0	0	
3	MARET	11	0	0	0	
4	APRIL	14	0	0	0	
5	MEI	10	0	0	0	
6	JUNI	6	0	0	0	
7	JULI	1	0	0	0	
8	AGUSTUS	4	2	0	0	
9	SEPTEMBER	4	0	0	0	
10	OKTOBER	5	0	0	0	
11	NOVEMBER	3	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		<b>65</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 3. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum (Bandung, Kasasi dan PK).

Dari jumlah Perkara masuk dan yang putus ada beberapa yang mengajukan Upaya Hukum (Bandung dan Kasasi) sesuai table berikut :

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Perkara kejahatan dan pelanggaran putus	67
2	Perkara yang mengajukan banding	9
3	Dari putusan tingkat banding yang mengajukan kasasi	8
4	Putusan bebas, Oditur mengajukan Kasasi	1
Total perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum		57

### **C. AKRREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIKASI ISO PENGADILAN)**

#### 1. Posbakum

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun anggaran 2019 tidak memperoleh alokasi anggaran untuk Posbakum.

#### 2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Bahwa salah satu unsur untuk mencapai suatu sistem kinerja yang baik dalam perkantoran adalah mewujudkan suatu tatanan administrasi yang baik, apalagi karena wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta saat ini masalah penyelesaian perkara menjadi salah satu prioritas tugas yang harus dilaksanakan untuk mendukung tertibnya administrasi perkara dan administrasi perkantoran secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 41, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi :

- a. Pada Tingkat Pertama memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah.
- b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer.
- d. Memutus pada tingkat pertama sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Dalam rangka peningkatan pelayanan Hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, maka perlu diadakannya Sidang Daerah, yaitu terlaksananya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan khususnya wilayah Hukum D.I. Yogyakarta dan sebagian wilayah Jawa Tengah.

Tujuan dari sidang keliling ke daerah adalah membantu, mempermudah, memperlancar proses pelayanan Hukum serta produk-produk Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dikarenakan wilayah hukum Pengadilan Militer Bandung yang sangat luas serta hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara.

Kegiatan Sidang Keliling dilaksanakan di daerah Purwokerto, Wates dan Magelang, sesuai dengan tabel dibawah ini :

No	Tanggal Sidang	Tempat Sidang	Jml Perkara yang disidangkan	Jml Perkara yang diputus	Biaya	Dipa
1	2	3	4	5	6	7
1	9 s.d. 11 April 2019	Purwokero	4	4	10.320.000	19.110.000
2	18 Juli 2019 (Gaktif)	Wates	0	0	750.000	
3	30 Juli s.d. 1 Agustus 2019	Magelang	3	1	8.040.000	

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2019 tidak terdapat perkara prodeo (Pembebasan Biaya Perkara).

**BAB III**  
**SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Dalam Tahun 2019 personil Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berjumlah 41 (empat puluh satu) orang terdiri dari 23 (dua puluh dua) orang Militer dan 10 (sepuluh) orang ASN, dan 8 (delapan) orang tenaga kontrak/honorer, masing-masing anggota menduduki jabatan sebagai berikut :

No	Nama	Pangkat/Corp /NRP/NIP	Jabatan	Ket
a	b	c	d	e
	<b>I. Militer</b>			
1	Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.	Letkol Chk / 1198005959177	Kadilmil	
2.	Salis Alfian Wijaya, S.H.	Mayor Chk / 11020032230779	Waka dilmil	
3.	Patta Imang, S.H.	Mayor Chk / 2193123471271	Pokkimmil	
4.	Paija, S.H.	Mayor Chk / 2920087110870	Sekretaris	
5.	Mirza Ardiansyah	Kapten Laut (KH)/ 18870/P	Pokkimmil	
6.	Arhinta Mujdi Pranata, S.H., M.H.	Kapten Sus		
7.	Ahmad Suryadi, S.H.	Letda Chk / 21000075960980	Panmud Pidana	
8.				
9.	Rudianto	Peltu / 21960347440875	PP	
		Pelda Ekl / 96304	PP	
10.	Subroto Aji Saroso, A.Md	Serma / 21020294571083	Staf PTIP	
11.	Dwi Sumarwan	Serma	Staf Panmud	
12.	Ahmad Solikin	Serka/532773	Staf Kepegawaian	
13.	Riana Agustin			
		Serka/31960578830674	Staf Panmud	
14.	Wahyu Kalimantoro, S.H.	Serka/ 31960119480674	Staf Umum	
	Joko Yuswanto			
15.	Suwarno	Serka/31960769580275	Staf Panmud	
16.	Ahmad andi W., S.H.	Serka/31960604730776	Staf Kepegawaian	
17				
18.	Yohanes Isdwiyanto S.H.	Sertu/31980175051078	Staf Panmud	
		Sertu/31960588570375	Staf Umum	
19.	Bambang S., S.H			
20.				

a	b	c	d	e
21	Sri Udayana S., S.H.	Sertu/31990154410978	Staf Keuangan	
22	Riski Kusuma Wardani	Sertu/543472	Staf PTIP	
23	Dwi Laksono	Kopka/31980152021176	Staf Keuangan	
<b>II. PNS</b>				
24	Mardopo, S.E.	III d / 197810192006041014	Kasubbag Umum dan Keuangan	
25	Sugiarto	III c / 196703131992031003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	
26	Pujiono, S.H.	III b / 198508082006041003	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	
27	M.H. Ichsanudin, S.H.,MBA	III c / 198204182011011009	Staf Umum	
28	Roseno Mulyanto	III b / 196606101991031003	Staf Perpustakaan	
29	Suswantari	III b / 196912071992032002	Staf Kepaniteraan	
30	Ngatini	III b / 197606272006042002	Staf Umum	
31	Waluyo	III b / 196907231998031015	Staf Kepaniteraan	
32	Danu Lupita	III a / 197210102006041001	Staf PTIP	
33	Sularjo	III a / 196905021992021001	Staf Kepegawaian	
<b>III. Honorer</b>				
34	Dwi Hantoro	Honorer	Satpam	
35	Sri Widodo	Honorer	Satpam	
36	M. Syaefudin	Honorer	Satpam	
37	Maryuni	Honorer	Pengemudi	
38	Agung Dwi	Honorer	OB	
39	Hermawan	Honorer	OB	
40	Supriyanto	Honorer	OB	
41	Fahmi Triyana	Honorer	OB	

## 1. Mutasi

Mutasi atau pemindahan dapat berupa :

- a) Mutasi dari satu tugas ke tugas lain yang sederajat ( *Tour of duty* ).
- b) Mutasi dari satu daerah ke daerah lain dengan tugas yang sama (*Tour of area*).
- c) Kombinasi antara a dan b

Selama tahun 2019 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ada beberapa Personel yang telah mengalami Mutasi antara lain:

NO	NAMA	KETERANGAN	TGL
1	2	3	4
1	PNS Saiq Masduqi, S.Ag.,S.H.	Dari Pelaksana pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjadi Pelaksana pada Pengadilan Agama Wates Kelas I B	30-4- 2019
2	Mayor Chk Patta Imang, S.H	Dari Pamen Dilmiltama menjadi Anggota Pokkimmil Gol VI. Dilmil II-11 Yogyakarta.	26-7- 2019
3	Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.	Dari Pama Dilmiltama menjadi Anggota Pokkimmil Gol VII. Dilmil II-11 Yogyakarta.	26-7- 2019
4	Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.	Dari Kadilmil II-11 Yogyakarta menjadi Kadilmil I-04 Palembang	5-8-2019
5	Letkol Chk Rudy Dwi Prakamto, S.H.	Dari Pokkimmil Dilmil II-08 Jakarta menjadi Kadilmil II-11 Yogyakarta	5-8-2019
6	Mayor Chk Handoko, S.H.	Dari Sekretaris Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjadi Sekretaris II-09 Bandung	12-8- 2019
7	Mayor Chk Paija, S.H.	Dari Sekretaris Pengadilan Militer I-04 Palembang menjadi Sekretaris Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta	12-8- 2019
8	Serka Joko Yuswanto	Dari Operator Komputer Urahkara Otmil II-10 Yogyakarta menjadi Staf Umum dan Keuangan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.	4-9-2019

1	2	3	4
9	Mayor Sus Dahlan Suherlan, S.H	Dari Waka Dilmil II-11 Yogyakarta menjadi Anggota Pokkimmil Gol. V Dilmil I-02 Medan.	13-9-2019
10	Mayor Chk Salis Alfian Wijaya, S.H.	Dari Pokkimmil Gol. V Dilmil II-09 Bandung menjadi Waka Dilmil II-11 Yogyakarta.	13-9-2019
11	Serma Ahmat Solikin	Dari Staf Panmud Pidana Dilmiltama menjadi Staf Panmud Pidana pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.	1-11-2019
12	Serka Riana Agustin	Dari Baban Spri Kadilmiltama menjadi Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.	1-11-2019

#### 4. Promosi.

Pada dasarnya untuk suatu jabatan struktural ditetapkan satu pangkat pejabat yang dipercayakan untuk menduduki suatu jabatan yang lebih tinggi berarti suatu promosi/kenaikan. Pada tahun 2019 Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tersebut beberapa Jabatan Struktural sudah terisi, namun ada jabatan Struktural yang belum terisi yaitu Panitera Muda Hukum.

Selama tahun 2019 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta beberapa personel yang mengalami promosi dan atau kenaikan pangkat sebagai berikut :

NO	NAMA	KETERANGAN	TGL
1	2	3	4
1	PNS Pujiono, S.H.	Dari Staf Kepegawaian dan Ortala menjadi Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan pada Dilmil II-11 Yogyakarta	19-06-2019
2	PNS M. Hasyim Ichsanudin, S.H., MBA.	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Gol. III/c	1-04-2019

1	2	3	4
3	PNS Ngatini	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Gol. III/b	1-04-2019
4	PNS Sularjo	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Gol. III/a	1-04-2019
5	Dani Subroto, S.H., M.H.	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Kapten menjadi Mayor	1-10-2019
6	Subroto Aji S.	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Serma menjadi Pelda	1-10-2019
7	Suwarno	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Sertu menjadi Serka	1-10-2019
8	Achmad Andi W.	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Sertu menjadi Serka	1-10-2019
9	Sri Udayana S.	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Serda menjadi Sertu	1-10-2019
10	Riski Kusuma W	Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari Serda menjadi Sertu	1-10-2019

## 5. Pensiun.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00499/13001/AZ/03/19 tanggal 01 April 2019 tentang memberikan kenaikan pangkat pengabdian dan memberhentikan dengan hormat pada Pegawai Negeri Sipil atas nama Budi Supriyo Penata Tk I III.d Nip. 196104201984031003 terhitung mulai tanggal 1 April 2019.

## 6. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat).

Pada tahun 2019 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah mengirimkan Hakim-hakim dan Panitera yang telah mengikuti pelatihan maupun seminar Teknis Yudisial antara lain :



NO	NAMA	KEGIATAN	TANGGAL
1	2	3	4
1	Serma Dwi Sumarwan, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek SIPP pada lingkungan Peradilan Militer di Hotel Arjuna Yogyakarta	20 s.d. 22 Februari 2019
2	Serda Riski Kusuma Wardani	Mengikuti kegiatan Bimtek SIPP pada lingkungan Peradilan Militer di Hotel Arjuna Yogyakarta.	20 s.d. 22 Februari 2019
3	Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.	Mengikuti acara silaturahmi Panglima TNI bersama komuniti hukum TNI dan Rakorniskum Babinkum TNI TA. 2019.	5 s.d. 8 Maret 2019
4	Letkol Laut (KH/W) Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.	Mengikuti Seminar Nasional dalam rangka memperingati HUT IKAHI ke-66 tahun 2019 di Hotel Mercure Ancol Jakarta.	21 s.d. 21 Maret 2019
5	Mayor Chk K.G. Raegen, S.H.	Mengikuti Seminar Nasional dalam rangka memperingati HUT IKAHI ke-66 tahun 2019 di Hotel Mercure Ancol Jakarta.	21 s.d. 21 Maret 2019
6	PNS Pujiono, S.H.	Mengikuti Bimtek, Implementasi, Penataan dan Pengelolaan Perpustakaan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.	26 s.d. 28 Juni 2019
7	PNS Roseno Mulyanto	Mengikuti Bimtek, Implementasi, Penataan dan Pengelolaan Perpustakaan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta.	26 s.d. 28 Juni 2019
8	Kapten Chk Dani Subroto, S.H., M.H.	Mengikuti Bimtek bagi Panitera pada lingkungan Peradilan Militer di Hotel Horison Ultima Riss Malioboro Yogyakarta.	3 s.d. 5 Juli 2019
9	Peltu Rudianto	Mengikuti Bimtek bagi Panitera pada lingkungan Peradilan Militer di Hotel Horison Ultima Riss Malioboro Yogyakarta.	3 s.d. 5 Juli 2019
10	Letkol Chk Rudy Dwi Prakamto, S.H.	Melaksanakan kegiatan evaluasi lanjutan pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Hotel Mercure Convention Centre Ancol Jakarta	7 s.d. 9 Agustus 2019
11	Letda Chk A. Suryadi, S.H.	Mengikuti kegiatan Bimtek Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer di Hotel Swiss Belinn Surabaya	21 s.d. 23 Agustus 2019

1	2	3	4
12	PNS Waluyo	Mengikuti kegiatan Bimtek Ketatalaksanaan Perkara Pidana Militer di Hotel Swiss Belinn Surabaya.	21 s.d. 23 Agustus 2019
13	Mayor Chk Djunaedi Iskandar, S.H.	Mengikuti Diklapa II Cab. TNI AD TA. 2019	30 Agustus s.d. 19 Desember 2019
14	Mayor Chk Patta Imang, S.H.	Mengikuti Diklapa II Cab. TNI AD TA. 2019	30 Agustus s.d. 19 Desember 2019
15	Kapten Chk Dani Subroto, S.H., M.H.	Mengikuti Diklapa II Cab. TNI AD TA. 2019	30 Agustus s.d. 19 Desember 2019
16	PNS Danu Lupita, S.H.	Sosialisasi Aplikasi Siratmil dan Sippintter di Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI Jakarta.	9 s.d. 11 September 2019
17	Letkol Chk Rudy Dwi Prakamto, S.H.	Mengikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Hotel Grand Kemang Jakarta.	16 s.d. 17 September 2019
18	Kapten Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.	Mengikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Hotel Grand Kemang Jakarta.	16 s.d. 17 September 2019
19	Mayor Chk K.G. Raegen, S.H.	Mengikuti Susjabkimmil TA. 2019 di Kodiklat TNI Serpong Tangsel.	23 September s.d. 19 Des 2019
20	Mayor Chk Salis Alfian Wijaya, S.H.	Mengikuti Pelatihan Manajemen Media bagi Ketua Pengadilan Tahun 2019 di Kampus Balitbang Kumdil MA RI Bogor.	15 s.d. 22 September 2019
21	Letda Chk A. Suryadi, S.H.	Mengikuti Suspatera Crash Program TA. 2019 di Kodiklat TNI Serpong Tangsel.	20 September s.d. 18 Des 2019
22	Mayor Chk Salis Alfian Wijaya, S.H.	Mengikuti Kegiatan Pengukuran Dampak Kinerja dan Workshop "Profesionalisme dan Integritas Hakim" Komisi Yudisial RI di Semarang.	3 Oktober 2019

1	2	3	4
23	Kapten Laut (KH) Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.	Mengikuti Kegiatan Pengukuran Dampak Kinerja dan Workshop "Profesionalisme dan Integritas Hakim" Komisi Yudisial RI di Semarang.	3 Oktober 2019

## BAB IV

### Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana dan Teknologi Informasi

#### A. Pengelolaan Keuangan

1. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663292) Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai :

- Pagu	Rp 2.011.937.000,-
- Realisasi	Rp.1.900.970.164,-
- Sisa	Rp. 110.866.836,-

b) Belanja Barang Operasional

- Pagu	Rp. 979.357.000,-
- Realisasi	Rp. 908.517.779,-
- Sisa	Rp. 70.839.221,-

c) Belanja Modal

- Pagu	Rp. 50.000.000,-
- Realisasi	Rp. 50.000.000,-
- Sisa	Rp 0,-

2. Bahwa untuk Pengelolaan keuangan DIPA satuan kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta (663293) Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a) Belanja Barang Operasional

- Pagu	Rp. 63.850.000,-
- Realisasi	Rp. 55.138.350,-
- Sisa	Rp. 8.711.650,-

b) Belanja Barang Non Operasional

- Pagu	Rp. -
- Realisasi	Rp. -
- Sisa	Rp. -

## B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

### 1. Sarana dan Prasarana Gedung

Kantor Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta yang beralamat di Jl. Majapahit Banguntapan Bantul D.I. Yogyakarta di bangun diatas tanah seluas  $\pm$  2.640 M<sup>2</sup> dan luas bangunan seluas 1.672 M<sup>2</sup> yang telah bersertifikat atas nama Pemerintahan Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI.

Adapun data Aset Tanah, Bangunan Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut :

#### a. Keadaan Gedung

Tabel : Ruang Kantor Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Ruangan Kantor	Jumlah	Keterangan
1.	Ruang Kepala	1 Ruang	Kondisi Baik
2.	Ruang Wakil Kepala	1 Ruang	Kondisi Baik
3.	Ruang Hakim	2 Ruang	Kondisi Baik
4.	Ruang Panitera	1 Ruang	Kondisi Baik
5.	Ruang Sekretaris	1 Ruang	Kondisi Baik
6.	Ruang Sidang Umum	2 Ruang	Kondisi Baik
7.	Ruang Kepaniteraan	1 Ruang	Kondisi Baik
8.	Ruang Kepaniteraa Muda Pidana	1 Ruang	Kondisi Baik
9.	Ruang Kepaniteraan Muda Hukum	1 Ruang	Kondisi Baik
10.	Ruang Panitera Pengganti	1 Ruang	Kondisi Baik
11.	Ruang Sub Bag. Umum dan Keuangan	1 Ruang	Kondisi Baik
12.	Ruang Sub Bag. Kepegawaian dan Ortala	1 Ruang	Kondisi Baik
13.	Ruang Sub Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan	1 Ruang	Kondisi Baik
14.	Ruang Sub Bag. Keuangan dan Pelaporan	1 Ruang	Kondisi Baik
15.	Ruang Server dan TI	1 Ruang	Kondisi Baik
16.	Ruang Arsip Perkara	1 Ruang	Kondisi Baik
17.	Ruang Perpustakaan	1 Ruang	Kondisi Baik
18.	Ruang Tamu Terbuka	1 Ruang	Kondisi Baik
19.	Ruang Rapat Pimpinan	1 Ruang	Kondisi Baik

#### b. Fasilitas Perkantoran

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi (unit)			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Mesin Ketik Manual	1	1			
2	Mesin Ketik Elektrik	1	1			
3	Lemari Besi/Metal	13	13			
4	Lemari Kayu	8	8			
5	Rak Kayu	5	5			
6	Filling Cabinet Besi	10	10			
7	Filling Cabinet Kayu	19	19			
8	Brandkas	2	2			
9	Buffet	9	9			
10	Mobil File	2	2			

11	CCTV - Camera Control Television System	1	1			
12	Movitex Board	1	1			
13	Alat Penghancur Kertas	3	3			
14	Mesin Absensi	2	2			
15	Alat Pemotong Kertas	1	1			
16	Mesin Laminating	1	1			
17	LCD Projector/Infocus	2	2			
18	Papan Pengumuman	1	1			
19	Meja Kerja Kayu	50	50			
20	Kursi Besi/Metal	316	316			
21	Kursi Kayu	18	18			
22	Sice	14	14			
23	Bangku Panjang Kayu	17	17			
24	Meja Komputer	9	9			
25	Tempat Tidur Kayu	3	3			
26	Sketsel	2	2			
27	Meja Resepsionis	1	1			
28	Kasur/Spring Bed	2	2			
29	Backdrop TV/Wardrobe	2	2			
30	Gantungan Jas	6	6			
31	Nakas	2	2			
32	Meubelair Lainnya	58	58			
33	Jam Mekanis	22	22			
34	Kipas Angin	2	1		1	
35	Kitchen Set	1	1			
36	A.C. Split	20	20			
37	Alat Dapur Lainnya	2	2			
38	Televisi	7	7			
39	Loudspeaker	3	3			
40	Sound System	1	1			
41	Karaoke	1	1			
42	Wireless	1	1			
43	Microphone	1	1			
44	Mic Conference	5	5			
45	Unit Power Supply	26	22		4	
46	Stabilisator	1	1			
47	Tustel	1	1			
48	Lambang Garuda Pancasila	4	4			
49	Gambar Presiden/Wakil Presiden	4	4			
50	Tiang bendera	8	8			
51	Tangga Alumunium	2	2			
51	Dispenser	5	5			
52	Lambang Instansi	1	1			
53	Karpet	13	13			
54	Handy Cam	1	1			
55	Vertikal Blind	64	64			

56	Kabel Rol	1	1			
57	Alat Rumah tangga Lainnya	61	61			
58	Panggung	2	2			
59	Microphone/Boom Stand	1	1			
60	Pesawat Telephone	15	15			
61	Facsimile	2	2			
62	Tripod	1	1			
63	Internet	1	1			
64	Komputer Jaringan Lainnya	1	1			
65	PC Unit	36	32		4	
66	Laptop	22	21		1	
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	31	31			
68	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	3			
69	Server	4	4			
70	Router	4	4			
71	Rak Server	1	1			

c. Kendaraan Dinas

Tabel : Fasilitas Perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

No	Nama Barang	Tahun Perolehan	Kondisi (unit)			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
	<b>Jenis Kendaraan Roda 4</b>					
1.	Minibus Toyota Inova	2019	√			Pihak Ketiga
2	Minibus Toyota Inova	2008	√			
3	Minibus Toyota Inova	2011	√			
	<b>Jenis Kendaraan Roda 2</b>					
1	Honda Supra x 125	2006	√			
2	Honda Supra x 125	2007	√			
3	Honda Supra x 125	2008	√			
4.	Honda Mega Pro	2008	√			
5.	Honda GL Max	2006		√		

d. Rumah Dinas

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai Rumah dinas untuk Kepala, Wakil Kepala, Hakim, Panitera dan Sekretaris.

**2. Pengadaan**

Mahkamah Agung RI merupakan suatu Lembaga Negara yang mempunyai visi terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung berdasarkan

Road Map an Grand Desain reformasi birokrasi Mahkamah Agung salah satunya dengan meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana pembangunan gedung kantor Prototype sebagai wujud pelayanan masyarakat pencari keadilan.

Salah satu faktor pendukung kelancaran tugas pada suatu lembaga dan merupakan suatu syarat yang sangat penting adalah sarana dan prasarana / fasilitas gedung beserta kelengkapannya. Tahun Anggaran 2019 terdapat alokasi dana pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Adapun rincian pengadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No	Paket Pekerjaan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi	Rp.50.000.000,-	Rp. 50.000.000,-	Sudah dilaksanakan

### 3. Pemeliharaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) tentang pengelolaan aset Negara, bahwa aset Negara harus dikelola, dirawat dan dipelihara dengan baik, dengan efektifitas dan efisien pada penggunaannya. Penggunaan sarana dan prasarana fasilitas gedung hendaknya tetap terjaga serta terpelihara dengan baik supaya peruntukan dan penggunaannya serta pemanfaatannya benar-benar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan Negara dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung untuk tahun anggaran 2019 pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dapat dirincikan sebagai berikut:

#### a. Gedung Bangunan.

Untuk kegiatan pemeliharaan gedung pada TA 2019 telah dilaksanakan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut:



No	Paket Pekerjaan	Rencana	Realisasi	Ket
1.	Perawatan Gedung dan Bangunan	Rp.158.000.000,-	Rp.155.586.103,-	Sudah dilaksanakan

b. Peralatan dan mesin.

Untuk kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin pada TA 2019 telah dilaksanakan baik oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sebagai berikut :

No	Jenis pemeliharaan	Volume	Pagu	Realisasi	Sisa
1	2	3	4	5	
1.	Kendaraan dinas roda 4	2	55.488.000	54.324.654	1.163.346
2.	Kendaraan dnas roda 2	5	15.640.000	13.400.500	2.239.500
3.	AC Split	14	11.400.000	10.813.000	587.000
4.	PC dan Laptop	30	6.000.000	3.655.000	2.345.000
5.	Genset	1	3.000.000	3.000.000	0
6.	Printer	30	9.600.000	4.175.000	5.425.000
Jumlah			101.128.000	89.368.154	11.759.846

#### 4. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.

Pada tahun anggaran 2019 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara.

### C. Pengelolaan Teknologi Informasi

#### 1. Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) No 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik,

seluruh badan peradilan di 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib menggunakan e-court.

Akan tetapi sesuai Bab I Pasal 1 ayat 5 Perma No 3 tahun 2018 hanya mengatur tentang Tata Usaha Militer, sedangkan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum pernah memeriksa perkara tentang Tata Usaha Militer atau hanya memeriksa dan memutus perkara pidana (Kejahatan dan Pelanggaran Lalu lintas).

Guna mendukung Perma no 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah membuat sebuah aplikasi berbasis TI yang bernama Sippintter (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu) yang telah di resmikan oleh Dirjen Badilmiltun MARI pada tanggal 19 Februari 2019 dan sesuai perintah Dirjen Badilmiltun MARI di berlakukan kepada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer seluruh Indonesia berdasarkan Surat edaran Ditjen Badilmiltun MARI nomor 14/DjMT/SE/6/2019 tanggal 12 Juni 2019.

Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu (Sippintter) ini telah disosialisasikan ke satuan mitra kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam hal ini mulai dari tingkat POM (polisi Militer), Oditurat Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil).

Proses bisnis aplikasi Sippintter ini adalah pendaftaran perkara secara elektronik, dimana pelimpahan berkas perkara dari POM (Polisi Militer) kepada Oditurat Militer cukup di uplode ke aplikasi, setelah dikirim akan muncul *barcode*, barcode tersebut yang di kirim ke Oditurat Militer, begitu seterusnya sampai ke Lembaga Pemasyarakatan.

Akan tetapi aplikasi ini belum sempurna, di karenakan server Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum bisa menampung seluruh administrasi berkas perkara, maka untuk sementara yang di uplode hanya surat dakwaan dan sebagainya.

## **2. Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta**

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan,

Mahkamah Agung RI membangun sebuah Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan yaitu SIPP.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan *web-based application*, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua staff pengadilan dalam menjalankan setiap tugas yang ada. Sesuai dengan surat edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum No. 3/DJU/HM02.3/6/2014 bahwasanya setiap elemen tugas dan staff dipengadilan wajib menggunakan aplikasi SIPP dalam memproses pencatatan administrasi perkara dipengadilan. Setiap pengguna memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) masing-masing posisi. Setiap staff pengadilan wajib memiliki satu username dan password yang dapat digunakan untuk login atau validasi untuk dapat masuk kedalam aplikasi SIPP.

Terkait dengan pelayanan publik kemudian Kepaniteraan Mahkamah Agung RI meluncurkan program Layanan Informasi "*One Day Publish*". Program "*One Day Publish*" adalah pemicu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selanjutnya Satker dibawah Mahkamah Agung RI yang telah mengimplementasikan SIPP, dituntut untuk memberikan pelayanan publik berupa "*One Day One Publish*".

"*One Day One Publish*" merupakan maklumat pelayanan kepada publik bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan mempublikasikan informasi perkara pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta juga akan mempublikasikan putusan pada hari yang sama dengan perkara tersebut dikirim ke Terdakwa, Ankum, Papera, Penyidik, Otmil dan Kesatuan.

Dalam upayanya memberikan layanan kepada publik ini, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan memuat informasi perkara di laman website resmi <https://www.dilmilyogya.go.id/> dan SIPP Web Satker Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta <http://sipp.dilmil-yogya.go.id> pada hari yang sama dengan perkara tersebut diputus. Dimana masyarakat pencari keadilan bisa mengakses langsung pada laman resmi tersebut.

## **BAB V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. Akreditasi Penjaminan Mutu**

Akreditasi (*Acreditation*) merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Penjaminan Mutu adalah serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi penjaminan mutu *Indonesia Court Performance Excellence* (ICPE) merupakan ISO plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan International Framework Court Excellence (IFCE), pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badilmiltun MARI.

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah bagaimana mewujudkan badan peradilan yang agung ini bersih dan memiliki pelayanan prima sesuai tujuan *blue print* Mahkamah Agung RI tahun 2010-2035.

Kriteria Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu terdiri dari 5 (lima) area yaitu :

- 1) Area-1 Assesmen (Kepemimpinan) di Peradilan Militer
- 2) Area-2 Assesmen Pola Bindalmin dan SOP (*Standard Operational Procedure*) Penyelesaian Perkara Peradilan Militer
- 3) Area-3 Assesmen Sarana dan Prasarana Peradilan Militer
- 4) Area-4 Assesmen Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Aplikasi Berbasis IT Lainnya di Peradilan Militer
- 5) Area-5 Assesmen Pelayanan Meja Informasi dan Penanganan Pengaduan di Peradilan Militer

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu Ditbinganismil yang telah dinilai oleh Tim Audit Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilmiltun MARI pada tanggal 21 Juni

2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memperoleh nilai total akreditasi 96,61 (sembilan puluh enam koma enam puluh satu) dengan predikat **EXCELLENT**.

## **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan publik. Memangkas birokrasi pelayanan dan sebagai upaya mencapai good governance/kepemerintahan yang baik.

Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik seluruh peradilan militer termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempedomani Keputusan Ditjen Badilmiltun MARI Nomor 460/DjMT/KEP/8/2018 tentang Pedoman Standart Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.

Maksud dan tujuan PTSP yaitu untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada masyarakat yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk diketahui bahwa dalam PTSP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terdapat 4 bidang pelayanan yaitu Kesekretariatan, Kepaniteraan, Pengaduan dan Informasi. Diharapkan dengan adanya PTSP ini masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh pelayanan yang cepat tanpa harus bersinggungan dengan petugas lainnya selain petugas PTSP sehingga dapat meminimalisir kemungkinan adanya praktek-praktek yang bersifat Koruptif.

Berdasarkan penilaian dari Ditjen Badilmiltu MARI mulai tanggal 29 sampai dengan 31 Agustus 2018 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendapat Piagam Penghargaan dari Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 05-MIL / DJMT / PTSP / SERTIFIKAT / 09 / 2018 berpredikat Juara Harapan II.

## **C. Inovasi Pelayanan Publik**

Untuk mencapai good governance/kepemerintahan yang baik, pimpinan Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada seluruh badan Peradilan di 4 (empat) lingkungan Peradilan termasuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk berinovasi dalam segala aspek pelayanan.

Bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di tahun 2019 telah membuat beberapa inovasi antara lain sebagai berikut :

1. Aplikasi Sippintter (Aplikasi Sistem Peradilan Pidana Militer Terpadu)
2. Aplikasi Persuratan
3. Terdapat Ruang Pembacaan Putusan Bading/Kasasi

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. INTERNAL**

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana kerja yang telah digariskan. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai kawal depan (*provost*) Mahkamah Agung RI dalam melakukan pengawasan senantiasa berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Dalam hal pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berpedoman pada Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, disamping itu pula berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Dirjen Badilmiltun serta Kadilmiltama

Tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selain mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam tingkat pertama adalah melakukan pengawasan. Ada tiga hal yang menjadi obyek pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yaitu bidang teknis peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas putusan, bidang administrasi baik administrasi peradilan maupun administrasi umum yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada pencari keadilan, dan bidang perilaku pejabat peradilan (Hakim dan Panitera) untuk meningkatkan pelaksanaan fungsi peradilan yang sesuai dengan kode etik profesi Hakim.

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan pengawasan internal yang meliputi pengawasan fungsional bidang masing-masing :

- 1) Hakim/Pengawas Bidang Kedisiplinan Hakim dan Pegawai.
- 2) Hakim/Pengawas Bidang Informasi dan Pelayanan Publik.
- 3) Hakim/Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- 4) Hakim/Pengawas Bidang Umum dan Keuangan.
- 5) Hakim/Pengawas Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- 6) Hakim/Pengawas Administrasi Perkara.

Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai Hakim pengawas terhadap para hakim yang berada dibawah pengawasan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Memonitor tentang tingkah laku dan perbuatan para Hakim dan Panitera dalam menjalankan tugasnya, kemudian memberikan penilaian untuk mengevaluasi tingkat penguasaan teknis yustisial maupun tingkat mental yang baik di jajaran wilayah Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kadilmil II-11 Yogyakarta juga menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik mengenai jalannya peradilan maupun tingkah laku aparat peradilan, dengan mencari informasi, melakukan penelitian dan penelaahan.

Hakim Pengawas yang ditunjuk telah melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang kemudian hasil pengawasan ditindaklanjuti oleh Panitera/Sekretaris dan staf serta dilaporkan kepada Kadilmil.

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan langsung pada hari Senin minggu pertama setiap bulan diadakan jam Komandan dengan tujuan memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas dan disiplin kerja agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara berdayaguna dan berhasilguna. Serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan.

Demi tertibnya administrasi perkara, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan minutasasi penjilidan berkas perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dan terketik rapi serta membuat himpunan Petikan Putusan, Putusan dan Berita Acara Sidang setiap Triwulan untuk dijadikan dokumen/arsip dan salinan putusan dikirim kepada Papera, Otmil, Ankum dan POM Penyidik (vide pasal 196 ayat (3) Undang-Undang 31 Tahun 1997) sedangkan himpunan petikan putusan dikirim kepada Dirjen Badilmiltun, Dilmiltama dan Dilmilti II Jakarta pada kesempatan pertama, sedang untuk tertib administrasi keuangan perkara dan persiapan akan dilaksanakannya pemeriksaan keuangan oleh BPK, maka Hakim Pengawas Bidang dan Koordinator Pengawas telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan keuangan perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Tujuan diadakannya pengawasan dan pembinaan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 pasal 3 ayat (1) dan (2) adalah :

- a) Memantau, mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku secara



berdayaguna dan berhasilguna;

b) Meminta laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas bawahan;

c) Mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala dan penyimpangan serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab dan akibatnya serta cara mengatasinya;

d) Merumuskan tindak lanjut dan mengambil langkah-langkah yang tepat sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan kewenangan pejabat/instansi yang terkait;

e) Berkonsultasi kepada atasan langsungnya secara berjenjang dalam rangka meningkatkan mutu pengawasan yang dilakukannya.

f) Menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dalam struktur organisasi di bawah kendalinya secara berkala;

g) Menetapkan dan menyetujui sasaran kinerja bawahan serta memberikan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas capaian kinerja bawahan;

h) Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur atau cara pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang dinilai kurang jelas atau belum diatur secara khusus;

i) Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik.

## **B. EVALUASI**

Sesuai dengan pedoman pengawasan maka pada pengawasan regular ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

1. Pelaksanaan tugas pokok dilingkungan kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan dan administrasi perkara.
2. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup administrasi kepegawaian, keuangan. Inventaris dan administrasi umum lainnya.
3. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik khususnya pada satuan-satuan militer yang berada di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada pelaksanaan program kerja Tahun Anggaran 2019 ini, kami sampaikan beberapa hal yang berkenaan dengan hal-hal menonjol, hambatan-hambatan, solusi, kesimpulan dan saran yang akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan wilayah hukumnya hingga saat ini sudah menggunakan struktur organisasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
2. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) telah menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka untuk mewujudkan adanya reformasi birokrasi di lingkungan peradilan dan sekaligus menjadi acuan dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer.
3. Penyelesaian perkara dalam tahun 2019 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berhasil menyelesaikan perkara kejahatan sebanyak 60 (enam puluh) perkara, dan perkara pelanggaran yang putus sebanyak 7 (tujuh) perkara.
4. Pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan tertib walaupun masih terdapat kekurangan dan perlu penyempurnaan.
5. Pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan tepat waktu.
6. Personel Dilmil II-11 Yogyakarta sampai saat ini baik Militer maupun ASN masih sangat kurang dibandingkan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus di emban sesuai dengan jumlah perkara yang ada.
7. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai rumah dinas bagi pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-11 Yogyakarta.
8. Hambatan.

Pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA Tahun Anggaran 2019 terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

a) Personel.

Personel satuan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta masih sangat kurang karena setiap tahun ada ASN yang pensiun pada Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan dan kurang dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk setiap bulannya, sehingga perlu penambahan personil baik Militer maupun ASN.

b) Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Hukum di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sampai saat ini belum terisi.

c) Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sudah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga uraian tugas dan tanggungjawab organisasi telah seragam dengan Pengadilan lingkungan pengadilan lain yang satu atap dengan MARI.

Untuk pengembangan karir ASN sangat sulit karena terbatasnya jabatan yang bisa di duduki oleh ASN.

9. Solusi.

Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan pada pelaksanaan Program Kerja dan DIPA termin waktu Tahun Anggaran 2019 di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan beberapa langkah dalam mengatasi berbagai kendala dan keterbatasan yang ada dengan rangkap tugas dan tanggungjawab personel serta dengan mengaplikasikan tugas dan kewenangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beban tugas pengadilan satu atap di bawah Mahkamah Agung RI.

Hal tersebut tentunya dengan melihat berbagai keterbatasan dan kekurangan yang ada, semaksimal mungkin Pengadilan Militer II-11

Yogyakarta dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dengan baik dan tepat waktu.

#### B. Rekomendasi

1. Untuk Meningkatkan Kinerja dan disiplin bagi pegawai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, perlu terus di tingkatkan pengawasan, baik secara struktur oleh atasan langsung maupun secara fungsional oleh Hakim Pengawas Bidang.
2. Dengan telah bertambahnya fasilitas kantor, perlu disesuaikan anggaran untuk keperluan pemeliharaan baik gedung maupun fasilitas gedung tersebut.
3. Guna mendukung kelancaran penyelesaian perkara dan tugas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, mohon penambahan tenaga Fungsional Panitera, ASN yaitu Tenaga IT dan Komputer berkualifikasi Diploma III atau Sarjana Teknik Informatika/Teknik Komputer/Sistem Informasi.
4. Mohon dapatnya pengadaan rumah dinas bagi pejabat Kadilmil dan Waka Dilmil II-11 Yogyakarta.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 yang kami susun sebagai pertanggung jawaban atas Penetapan Kinerja dan DIPA Tahun Anggaran 2019 yang terealisasi dalam program kerja dan anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2019 dengan berbagai kendala dan persoalan yang kami hadapi dan telah kami sampaikan dalam saran di atas, mohon satuan atas dapat merespon dan memberikan solusi sebaik-baiknya.

Yogyakarta,       Desember 2019  
Kepala Pengadilan Militer II-11

Rudy Dwi Prakamto, S.H.  
Letkol Chk NRP 1198005959177